

Fenomena Bitcoin dan BPK Masa Depan

Oleh: Nico Andrianto, Alumnus Program Master of Policy and Governance, Crawford School of Public Policy, The Australian National University, penulis buku *Good e-Government*.



SERUJI.CO.ID – *Bitcoin* menggegerkan publik internasional hari-hari ini, karena meroket nilai tukarnya terhadap Dollar mendekati 20.000 dari sekitar 0,01 di tahun 2009. Nilai pasar *Bitcoin* yang tanpa *underlying aset* ini fluktuatif, seiring perilaku penggunanya yang spekulatif.

Virtual currency ini semakin *mainstream*, dengan bermunculan ATM ataupun alat bantu transaksinya untuk berbagai bisnis barang dan jasa di berbagai negara. Bahkan Menteri Keuangan Perancis mendorong untuk menjadikannya bahan diskusi pada pertemuan G-20, April mendatang, sebuah peringatan potensi dampak negatif *virtual coin* terhadap kestabilan ekonomi banyak negara.

Meskipun ditolak beberapa otoritas Bank Sentral, tidak disadari *crypto currency* ini telah digunakan oleh *Facebook* ataupun *Youtube*. Terlebih, masyarakat Indonesia juga terbiasa menggunakan *e-toll*, produk-produk *financial technology*, dan bahkan telah diperkenalkan penggunaan kartu kredit dalam pelaksanaan APBN (Kompas.com, 21/2). Fajar era *digital* telah menyingsing dengan ciri *internet of things* dan *sharing economy*, mengonfirmasi teori Christensen (1997) tentang produk teknologi *disruptif* yang lebih murah, cepat, dan memudahkan.

Terungkap dalam diskusi *Inside Story* di Al Jazeera, *virtual currency* yang verifikasiya terdesentralisasi melalui sistem *blockchain* ini bersifat otonom dan *borderless*. Mata uang yang sebenarnya kode-kode komputer belaka ini juga ideal bagi pelaku kejahatan. Relevansi fenomena *Bitcoin* terhadap Badan yang bertugas memeriksa pengelolaan Keuangan Negara (BPK) karena percabangan tantangan yang ujungnya tidak tunggal. Pertama, kerevolusioneran sifat *Bitcoin* sebagai produk digitalisasi gelombang ketiga, kedua, resikonya terhadap keamanan perekonomian negara, dan ketiga, memunculkan tuntutan *shifting* paradigma sektor publik.

Merespon Revolusi TI

Government Accountability Office (GAO) Amerika Serikat pernah memprediksi bahwa tantangan kedepan bagi pemerintah adalah perkembangan terutama dalam Teknologi Informasi. Dalam konteks Indonesia, data *Hootsuite* per Januari 2018 menjelaskan penetrasi internet telah mencapai 132,7 juta (separuh populasi), dimana 79 persen diantaranya adalah pengguna harian rata-rata 8 jam 51 menit. Sementara pengguna aktif media sosial mencapai 130 juta orang (49 persen) selama 3 jam 23 menit per hari. *Handphone* telah dipegang oleh 177,9 juta penduduk (67 persen), dengan 120 juta (45 persen) diantaranya pengguna aktif aplikasi *chat*.

Hari ini bukan saja mobil listrik nirawak yang dikendalikan *smartphone* telah diwujudkan, bahkan ojek-pun *online*. Nilai transaksi rupiah *digital* bagi layanan transportasi *daring* atau belanja di *mall online* sangat signifikan. Dalam lingkungan ini tercipta *platform* ekonomi, *marketplace*, dan pola hubungan masyarakat yang baru, termasuk dengan pemerintahnya. Meningkatkan tuntutan agar layanan pemerintah di-*delivery* secara *digital*, 24 jam/7 hari, *real time* dan *on demand* berdasarkan hasil pembacaan *statistik analytic*.

Perkembangan *internet of things* ini menuntut munculnya *disruptive mindset*, *disruptive government*, *disruptive bureaucrat*, *disruptive leader*, dan juga *disruptive auditor*.

Beberapa pemimpin daerah inovatif berupaya mewujudkan *e-budgetting*, *drive-thru* PBB, pendaftaran siswa *online*, *smart city* bahkan *smart* kampung, sementara layanan beberapa BUMN juga telah lama bisa ditransaksikan *online*. Implementasi perkembangan ini bagi BPK lebih dari sekedar pemeriksaan keuangan tradisional dengan menarik data entitas secara elektronik (*e-audit*), namun perlu *shifting* ke konsep pemeriksaan yang mampu memaksimalkan *benefit* bagi *multi-stakeholders* melalui pemeriksaan kinerja yang menekankan keefektifan, keefisienan dan keekonomian pemerintah.

BPK perlu merancang pemeriksaan kinerja yang inovatif, saling menyumbang, berbagi, berkolaborasi dan berjejaring dengan berbagai pemangku kepentingan.

Sebagai referensi, BPK Belanda pernah merancang pemeriksaan kinerja mengenai kualitas sarana-prasarana sekolah dasar dengan melibatkan ribuan orang tua murid melalui sebuah survei internet menyerupai populasi sesungguhnya. Demikian pula BPK Filipina yang melibatkan masyarakat sipil dalam pemeriksaan kinerja atas layanan pemerintah.

Kondisi diatas menekankan pentingnya konsep *public value*, yaitu pengelolaan pemerintah yang mengindahkan aspirasi para pemangku kepentingan. Sehingga busung lapar di daerah yang memperoleh opini WTP bisa dihindarkan.

Mencapai Puncak Piramida Kematangan

Dalam piramida kematangan, organisasi BPK sedunia (INTOSAI) menjelaskan pasca pemberantasan korupsi, maka tugas SAI adalah meningkatkan transparansi, menjamin terlaksananya akuntabilitas, meningkatkan kualitas kebijakan pemerintah (*increasing insight*), dan memiliki visi ke depan yang lebih tajam agar dapat memberikan pilihan kebijakan terbaik bagi pemerintah (*facilitating foresight*). Maka salah satunya BPK perlu membuka kemungkinan mengintegrasikan pemeriksaan keuangan, kepatuhan dan kinerja dalam sebuah *long form report* dengan mendorong pemerintah membuat LAKIP yang lebih substantif agar bisa dinilai.

Sebagai "dokter yang secara berkala memeriksa kesehatan pengelolaan keuangan Pemerintah", pada puncak piramida *facilitating foresight* ini BPK harus mampu memberikan *early warning* terhadap kemungkinan ancaman krisis ekonomi baru pasca krisis serupa tahun 1998. Ancaman laten ini dapat dipicu oleh berbagai penyebab, termasuk fenomena gelombang digitalisasi ekonomi dimana *Bitcoin* berada di dalamnya (Kompas, 28/2).

Untuk itu BPK perlu memiliki *database* pemeriksaan kinerja yang kuat, *real time*, serta terintegrasi dengan indikator-indikator makro pembangunan; IPM, indeks kebahagiaan, pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan ataupun inflasi, nilai tukar Rupiah, dan lainnya. Disambungkan dengan data kependudukan dan pengaduan masyarakat elektronik, *database* ini berguna bagi perumusan rencana strategis dan pemeriksaan individual yang mampu menangkap aspirasi pemangku kepentingan. Maka akan tercipta semacam *command control*, ruangan pengendali level strategi dan taktikal sebuah "peperangan" untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel menuju tercapainya cita-cita bernegara.

Pemeriksaan kinerja pada dasarnya mengikuti perkembangan teori dan praktik kebijakan publik sebuah negara. Di negara-negara maju, bergulirnya wacana *New Public Management* mendorong swastanisasi berbagai layanan pemerintah untuk mengejar efektifitas dan efisiensi, seperti contoh ekstrem pengelolaan penjara di Australia oleh swasta atau kontraktor keamanan swasta di Amerika Serikat. GAO pernah melakukan pemeriksaan kinerja untuk meminimalkan tumpang-tindih program yang sama di berbagai Kementerian yang menghasilkan penghematan luar biasa atau *value for money*, serta menyusun *better practice guide* yang bisa diacu oleh entitas pemerintah.

Berikutnya, BPK harus mampu melakukan *scanning* atas *stakeholders*-nya, agar paradigma pemeriksaan kinerjanya tidak terkotak-kotak. Untuk itu, selain mengejar kuantitas, diperlukan peningkatan kapasitas, baik di level manajemen maupun pelaksana audit kinerja melalui penyiapan SDM dengan *passion* dan multi-disiplin keilmuan. Harapannya terbentuk spesialisasi yang mencerminkan fungsi-fungsi dalam pemerintahan; keamanan, kesejahteraan rakyat, perekonomian, ataupun kemaritiman. BPK juga harus mampu memandang pemerintah sebagai entitas yang bukan saja *cost center*, namun juga *revenue center* secara seimbang, yang tercermin dalam rencana pemeriksaan.

Lebih lanjut, menurut survei *google consumer barometer* 2018, 91 persen orang dewasa Indonesia menggunakan *mobile phone*, dimana *smartphone* menyentuh 60 persen. Di tengah pertumbuhan tahunan 23 persen sosial media dan 30 persen *mobile social*, 71 persen orang Indonesia percaya teknologi baru ini menawarkan lebih besar peluang daripada resiko, dan 68 persen lebih suka menyelesaikan tugasnya secara digital. Publik baru, terutama generasi *millennial* lebih akrab dengan gawai dan internet. Maka BPK perlu menjangkau mereka melalui pengomunikasian hasil pemeriksaan secara lebih efektif melalui *Facebook*, *Tweeter*, *Instagram*, *Whatsapp*, dan bahkan *Youtube*.

Akhirnya, sebagai lembaga yang berdiri di atas kepercayaan publik, BPK bukan hanya dituntut minim kesalahan, namun mampu mengantisipasi perkembangan lanskap pemerintahan kedepan. Gelombang ketiga digitalisasi menghasilkan berbagai *disruption*, musuh tak nampak yang bisa membunuh perlahan, setidaknya membuat tidak berfungsi optimal, institusi manapun yang tidak antisipatif. Untuk itu patut direnungkan kata-kata CEO Nokia saat menyerahkan divisi *handset* andalannya kepada Microsoft, "*Kami tidak melakukan kesalahan apapun, tiba-tiba kami kalah dan musnah*".